

Vol 3 No. 2 Oktober 2023

e-ISSN 2339-0840



JET

JURNAL EKONOMI TRISAKTI



WhatsApp

(12) Relaxing Music for Str...


EL-KITE

PP DETERMINASI KETIMPANGAN

PP Tim Editorial | Jurnal Ekonomi T...

e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/timeditorial

Sign in



JURNAL EKONOMI TRISAKTI

E-JOURNAL
UNIVERSITAS TRISAKTI

[SITE](#)
[PUBLICATION](#)
[HOME](#)
[TENTANG JURNAL](#)
[TERBARU](#)
[ARsip](#)
[PENGUMUMAN](#)
[PENYINGKALAN](#)

Tim Editorial

Pimpinan Redaksi

Tiara Puspa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Dewan Redaksi

Muhammad Yudhi Lutfi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Abubakar Arif
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Desty Survia
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida, Indonesia

Shine Pistor Sioemba Patiro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka, Indonesia

Indi Ramadhani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Silwangi, Indonesia

ARTICLE TEMPLATE

Article Template

TUTORIAL

Video Template

Manual Book Register

ADDITIONAL MENU

WhatsApp

(12) Relaxing Music for Str...

EL-KITE

PP DETERMINASI KETIMPANGAN

PP Tim Editorial | Jurnal Ekonomi T...

e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/timeditorial

Sign in

Tim Editorial

Pimpinan Redaksi

Tiara Puspa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Dewan Redaksi

Muhammad Yudhi Lutfi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Abubakar Arif
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Desty Survia
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida, Indonesia

Shine Pistor Sioemba Patiro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka, Indonesia

Indi Ramadhani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Silwangi, Indonesia

Jennifer Victoria Astari Haryanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Ibrahim Harsha Danya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Akh Shidqon
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

Ida Sri Wulandari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

ARTICLE TEMPLATE

Article Template

TUTORIAL

Video Template

Manual Book Register

ADDITIONAL MENU

- Pedoman Penulisan
- Fokus dan Ruang Lingkup
- Etika Publikasi
- Tim Editorial
- Mitra Bestari
- Kebijakan Penjiplakan
- Kunjungan Unik
- Sejarah

WhatsApp x (12) Relaxing Music for Str x EL-KITE x PNP Vol. 4 No. 1 (2024) April | June x +

www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/issue/view/1134

JURNAL EKONOMI TRISAKTI E-JOURNAL UNIVERSITAS TRISAKTI

SITE PUBLICATION HOME TENTANG JURNAL TERBARU ARSIP PENGUMUMAN PENYANGKALAN

REGISTER LOGIN

Home / Archives / Vol. 4 No. 1 (2024): April

Published: 2024-04-07

JET
JURNAL EKONOMI TRISAKTI

ANALISIS PENGARUH THE LOVE OF MONEY, GENDER DAN HEDONISME TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI DAN MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO)

Raden Roro Mitfarizza Luthiftri Yudhanti, Sofie

1-12

ARTICLE TEMPLATE

Article Template

TUTORIAL

Video Template

Manual Book Register

ADDITIONAL MENU

Type here to search

30°C Sebagian cerah 10:04 AM 12/16/2025

WhatsApp x (12) Relaxing Music for Str x EL-KITE x PNP Vol. 4 No. 1 (2024) April | June x +

www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/issue/view/1134

Abstract: 195 | PDF downloads:154

Rerangka TRANSFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SETELAH PANDEMI COVID-19
Konseptual Yohana Wea Nuwa Feto, Tiarapupa
789-794

Abstract: 304 | PDF downloads:500

Rerangka ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS PELANGGAN ASURANSI KESEHATAN
Konseptual Putri Jasmine CahyaNingrum Putri, Nurhayati, Syafri
795-804

Abstract: 466 | PDF downloads:374

Rerangka DETERMINASI KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH (2010-2020)
Konseptual Mona Adriana
805-818

Abstract: 1003 | PDF downloads:414

Rerangka REVIEW LITERATUR KOMPENSASI DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA
Konseptual Muh. Saleh, Tiarapupa
819-826

Abstract: 377 | PDF downloads:477

Rerangka PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEPEMILIKAN SAHAM MANAJERIAL, KEPEMILIKAN SAHAM INSTITUSIONAL DAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PADA NILAI PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017 - 2021
Konseptual Intan Setyarini, Hasnawati
827-836

Abstract: 156 | PDF downloads:132

Type here to search

31°C Sebagian cerah 10:06 AM 12/16/2025

The screenshot displays the homepage of the JURNAL EKONOMI TRISAKTI website. The header features the journal's title in large yellow letters on a blue background, along with the Universitas Trisakti logo. Navigation links include SITE, PUBLICATION, HOME, TENTANG JURNAL, TERBARU, ARSIP, PENGUMUMAN, and PENYANGKALAN. A search bar is located on the right.

The main content area shows the article details for "DETERMINASI KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH (2020-2020)". The author is Mona Adriana, from the Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. The article was published on March 14, 2024, and its DOI is https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.17448. Keywords listed are Ketimpangan, PAD, DAU, DAK, IPM, Jumlah Penduduk, Dimensions, Altimetrics, and Statistics. It has been read 1003 times and downloaded 414 times. There is a check for updates button.

The abstract states: "Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 -220 dengan menggunakan indeks Williamson sebagai variabel terikat dan PAD, DAU, DAK, IPM, jumlah penduduk independent variabel. Alat analisa yang digunakan adalah regresi OLS dan data panel. Berdasarkan hasil penelitian, model terbaik adalah Random Effect Model (REM) dan secara simultan PAD, DAU, DAK, IPM dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah sebesar 72,53% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Secara parsial variabel DAK, IPM, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan untuk PAD, DAU terbukti tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur."

On the right sidebar, there are links to ARTICLE TEMPLATE, TUTORIAL, Video Template, Manual Book Register, and ADDITIONAL MENU (Pedoman Penulisan, Fokus dan Ruang Lingkup, Etika Publikasi).

DETERMINASI KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH (2010-2020)

Mona Adriana^{1*}

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

*Penulis korespondensi: mona.as@trisakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 -220 dengan menggunakan indeks Willamson sebagai variabel terikat dan PAD, DAU, DAK, IPM, jumlah menjadi independen variabel . Alat analisa yang digunakan adalah regresi OLS dan data panel. Berdasarkan hasil penelitian, model terbaik adalah Random Effect Model (REM) dan secara simultan PAD, DAU, DAK, IPM dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah sebesar 72,53% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Secara parsial variabel DAK, IPM, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan untuk PAD, DAU terbukti tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Ketimpangan, PAD, DAU, DAK, IPM, Jumlah Penduduk

Abstract

The aim of this study was to analyze the factors that influence regional inequality in Central Java Province from 2010 -220 by using the Willamson index as the dependent variable and PAD, DAU, DAK, IPM, the amount as the independent variable. The analytical method used is OLS regression and panel data. Based on the research results, the best model is the Random Effect Model (REM) and simultaneously PAD, DAU, DAK, HDI and population have a significant effect on regional inequality of 72.53% and the rest are influenced by other variables not present in the study. Partially the variables DAK, HDI, and population have a significant effect on inequality, while for PAD, DAU is proven not to affect regional inequality in East Java province.

Keywords: Inequality, PAD, DAU, DAK, HDI, Population

Artikel dikirim: 26-07-2024

Artikel Revisi: 26-07-2024

Artikel diterima: 14-03-2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki ciri berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya yang berdampak dengan timbulnya perbedaan pola pembangunan di Indonesia. Perbedaan ini menjadikan kemampuan atau potensi wilayah menjadi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dimana ada wilayah yang mengalami pertumbuhan dengan cepat sementara wilayah lain tumbuh dengan lambat. Perbedaan kemampuan untuk tumbuh inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan antar wilayah (Yerikha Christi Gratia, 2020).

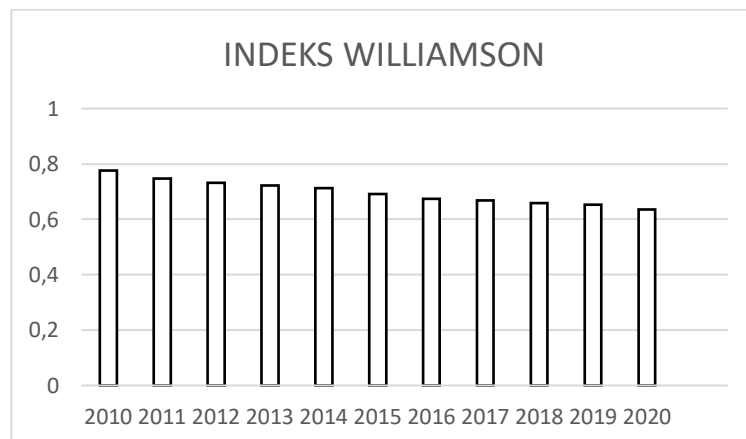
Ketimpangan ini dapat menimbulkan banyak permasalahan salah satunya adalah meningkatnya migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju dan akan menimbulkan

permasalahan baru seperti konflik antar masyarakat dan meningkatnya konflik antar masyarakat (Sarfiah, 2019)

Menurut pandangan teori Neo Klasik ketimpangan wilayah terjadi dikarenakan adanya perbedaan faktor-faktor produksi, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi dimana akibatnya mendorong proses pembangunan menjadi berbeda dimana ada daerah yang disebut maju dan daerah tertinggal. (Lukman Harun, 2012)

Sementara menurut (Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, 2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi disparitas daerah, yaitu 1) Sumber daya alam, 2) angkatan kerja 3) alokasi dana bentuk penanaman dana investasi, 4) kegiatan ekonomi.

Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota yang terletak di pulau Jawa dan tidak pula terlepas dari permasalahan ketimpangan wilayah yang harus diatasi dimana aspek pemerataan pendapatan menjadi tujuan utama dari pembangunan di Jawa Tengah. Ketimpangan wilayah sendiri jika dilihat dari indeks Williamson berada di angka yang cukup tinggi, yaitu lebih besar dari 0.5 Beberapa langkah telah dilakukan untuk menurunkan disparitas, hal ini terlihat dari angka indeks Williamson yang mengalami penurunan dari sebesar 0.777 sampai akhirnya di tahun 2020 mencapai angka 0.698 (BPS, Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, 2021)



Gambar 1. Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2020

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan antara kabupaten/kota adalah sumber daya alam kondisi infrastruktur yang berbeda-beda dimana hal tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapatan. Salah satunya adalah di Kabupaten Kudus yang memiliki PDRB Perkapita cukup tinggi karena memiliki beberapa perusahaan besar nasional yang beroperasi di sana. Hal yang sama dialami oleh Kota Semarang yang memiliki berbagai fasilitas infrastruktur seperti pelabuhan antar pulau dan bandara internasional dan menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah.

Perencanaan dan manajemen pembangunan yang dilakukan oleh beberapa daerah dengan baik menyebabkan timbulnya beberapa kawasan ekonomi yang strategis dan dengan melihat kondisi kabupaten/kota dari sisi sumber daya alam yang berbeda menjadi beberapa faktor yang

menimbulkan ketimpangan di provinsi tersebut. Ketimpangan yang terjadi memberikan dampak meningkatnya arus urbanisasi, tingkat pengangguran, kemiskinan yang meningkat, disisi lain timbulnya ketidakseimbangan kualitas dari SDM serta ketersediaan teknologi (BPS, Indeks Wiliamson Provinsis Jawa Tengah, 2021)

Menurut (Raden Annisa et, 2020) ketimpangan wilayah di Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa faktor ,seperti adanya perpindahan tenaga kerja dan memiliki pendidikan baik ke daerah yang lebih maju ; aliran penanaman modal ke kabupaten/kota yang maju atau berkembang yang disebabkan oleh faktor kondisi pasar, kesempatan kerja dan lokasi. Di sisi lain adanya kebijakan pemerintah yang cenderung teralokasi di daerah maju.

Akolasi investasi yang berbeda antara kabupaten/kota disebabkan oleh para investor lebih memilih wilayah dengan fasilitas yang baik, seperti sarana dan pra sarana perhubungan, jaringan listrik yang memadai, jaringan teekomunikasi, fasilitas perbankan, asuransi dan di sisi lain kualtias sumber daya manusia juga menjadi salah satu pertimbangan investor ingin menempatkan dana di sebuah lokasi.Hal ini lah yang akan menimbulkan ketimpangan wilayah dimana untuk daerah yang tidak memiliki fasilitas akan semakin tertinggal.

Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan wilayah dengan memberikan wewenang secara penuh kepada daerah untuk merencanakan anggaran pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan potensi daerah, membangun infrastruktur sesuai kebutuhan daerah agar pembangunan. Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari daerah tersebut. Sementara untuk membangun kebutuhan infrastruktur pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun dari beberapa penelitian menggambarkan bahwa kebijakan otonomi daerah dapat meningkatkan ketimpangan wilayah, dimana untuk daerah yang memiliki sumber daya , alokasi DAU dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sementara untuk beberapa daerah yang tidak kaya akan sumber daya , alokasi DAU tidak mampu meningkatkan PAD daerahnya. Menurut (Azizi, 2018) dalam penelitiannya mengenai dampak DAU terhadap ketimpangan wilayah menyatakan bahwa DAU memberikan dampak positif dan signifikan kepada ketimpangan di provinsi Sulawesi Selatan, hal ini menggambarkan jika alokasi DAU ditingkatkan akan mengakibatkan semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut. Hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mutia, 2018) bahwa DAU memberikan dampak positif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsis Sumatera Utara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan, 2007) DAU memberikan dampak secara positif 4 kabupaten/kota , yaitu Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang artinya penggunaan Dana Alokasi Umum di ke empat

kabupaten/kota tersebut belum optimal untuk memperbaiki distribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan wilayah yang terjadi.

Berbeda ketika dilihat dari sisi penggunaan Dana Alokasi Khusus yang memang salah satu tujuan utama dari alokasi dana tersebut adalah untuk meningkatkan infrastruktur daerah dan pada akhirnya memberikan dampak peningkatan pendapatan daerah. (Muhamad Sidik, 2020) dalam penelitiannya peran DAK menurunkan ketimpangan daerah di provinsi Jambi, dimana semakin besarnya proporsi dari DAK yang diberikan maka akan menurunkan ketimpangan wilayah. Hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azizi, 2018) dimana DAK memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan wilayah adalah dari sisi Makro ekonomi, menurut (Herman Sambodo et al, 2020) disparitas yang tinggi untuk mencapai PDRB disebabkan oleh jumlah pengangguran, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, angka partisipasi kasar Pendidikan dan indeks kesehatan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah alat ukur untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia, semakin tinggi IPM sebuah daerah maka menunjukkan proses pembangunan di daerah tersebut berhasil. (BPS, Indeks Pembangunan 2020, 2020). Menurut (Zusanty, 2020) IPM memberikan pengaruh negative terhadap ketimpangan antar daerah, dimana nilai konstanta IPM -0.104 menjelaskan Jika IPM naik sebesar 1 % akan memberikan dampak turunnya ketimpangan sebesar 0.104 %. Sementara menurut penelitian (Nurhuda, 2013) menemukan bahwa peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Jumlah Penduduk merupakan salah satu faktor pula yang mempengaruhi ketimpangan wilayah, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan memberikan dampak turunnya ketimpangan wilayah . Berdasarkan hasil penelitian (Michael, 2020) jumlah penduduk memiliki pengaruh negative terhadap ketimpangan wilayah, hal yang sama dengan penelitian (Asrahmaulyana, 2023) dimana jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah.

Dengan melihat terdapatnya beberapa variabel yang memberikan dampak terhadap ketimpangan wilayah, penulis memandang perlu untuk melakukan analisa mengenai determinasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Pembangunan Daerah.

Pembangunan ekonomi prioritas utamanya adalah untuk mengurangi disparitas antar wilayah, dimana meningkatnya pendapatan perkapita menggambarkan tumbuhnya perekonomian suatu daerah hanya saja di sisi lain dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Ketimpangan akan terjadi jika ternyata besarnya pendapatan nasional tidak dapat diikmati secara merata atau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

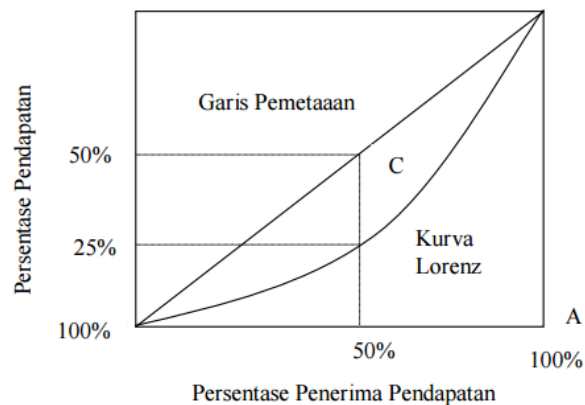
Beberapa bentuk ketimpangan adalah:

➤ *Distribution Income Disparities*

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya adalah sbb:

Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

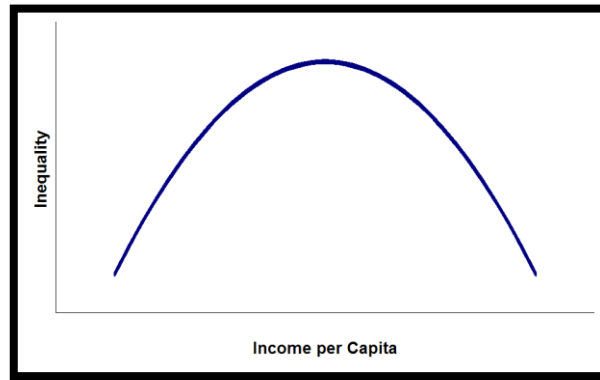
Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dengan menggunakan Kurva Lorenz, dalam hal ini kurva akan memperlihatkan hubungan secara kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total yang diterima selama satu periode tertentu.



Gambar 2.1. Kurva Lorenz

Bentuk Kurva Lorenz akan digambarkan dalam sebuah kotak dimana garis horizontalnya menggambarkan persentase penduduk penerima pendapatan dan garis vertikalnya menggambarkan persentase pendapatan. Ketimpangan wilayah semakin rendah, jika kurva memiliki bentuk yang semakin mendekat dengan diagonalnya berarti ketimpangan dan jika kurva menjauh dari diagonal maka ketimpangan akan meningkat. Beberapa bentuk dari Kurva Lorenz adalah: 50% penduduk yang menerima pendapatan akan memperoleh sebesar 50% jika kurva Lorenz diagonal OA atau dengan kata lain pembagian pendapatan rata secara sempurna. Serta 50% penduduk yang paling bawah mendapatkan 5% pendapatan dapat dikatakan memiliki pendapatan cukup (bentuk kurva Lorenz sisi siku OCA). Kurva Lorenz dengan sisi siku OBA menggambarkan 100% dari jumlah penduduk tidak mendapatkan pendapatan.

Jika pembangunan akan direncanakan terus berlanjut dengan didukung oleh semakin banyaknya fasilitas sarana dan prasarana maka mobilitas faktor produksi akan semakin lancar dan akan memberikan dampak berkurangnya kesenjangan ekonomi antar (*convergen*). Keadaan tersebut dapat digambarkan dalam sebuah kurva dengan bentuk “U” terbalik.



Gambar 2.2 .Kurva Kuznetz

Hipotesa dari neo klasik yang telah diuji kebenarannya oleh Jeffrey G. Williamson (1966) melalui sebuah studi tentang kesenjangan ekonomi antara wilayah di negara maju dengan sedang berkembang memakai data time series dan cross section. Dari penelitian menunjukkan bahwa hipotesa tersebut terbukti secara empiris, artinya sebuah proses pembangunan suatu negara tidak secara otomatis dapat menurunkan kesenjangan ekonomi antara wilayah dan di tahap awal dan berlaku sebaliknya (Sjafrizal, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, 2008)

▪ **Teori Kuznets (Hipotesis U Terbalik)**

Hipotesa yang dibuat oleh Simon Kusnetz dalam bentuk kurva U terbalik menggambarkan bahwa pada awal pembangunan dimulai akan mengakibatkan timbulnya distribusi pendapatan yang tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan akan menjadi semakin merata. Berdasarkan historis pembangunan di negara maju terlihat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi membuat distribusi pendapatan cenderung tidak baik, namun pada tahap berikutnya distribusi pendapatan akan membaik.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang didistribusikan dengan tujuan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pelaksanaan dari desentralisasi fiskal dari sisi DAU bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan di daerahnya dimana daerah memiliki otoritas penuh menggunakan dana tersebut sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah.

DAU diberikan dalam bentuk *block grant* untuk kabupaten/kota untuk memenuhi disparitas fiskal yang dialami oleh daerah dimana dalam mendistribukannya menggunakan formula yang didasarkan kepada teori-teori tertentu yang secara umum menggambarkan daerah yang belum berkembang mendapatkan DAU sesuai kebutuhannya atau dengan kata lain melalui DAU diharapkan kesanggupan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah menjadi semakin merata.

DAU sendiri dapat diartikan sebagai unsur dari dana perimbangan yang metode pengalokasiannya berdasarkan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Perangkat yang digunakan untuk mengatasi keseimbangan horizontal yaitu kesetaraan kemampuan keuangan antar daerah dan pemanfaatannya ditentukan secara penuh oleh daerah. Serta *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menentralisasi ketimpangan kemampuan keuangan, dimana besarnya DAU untuk daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

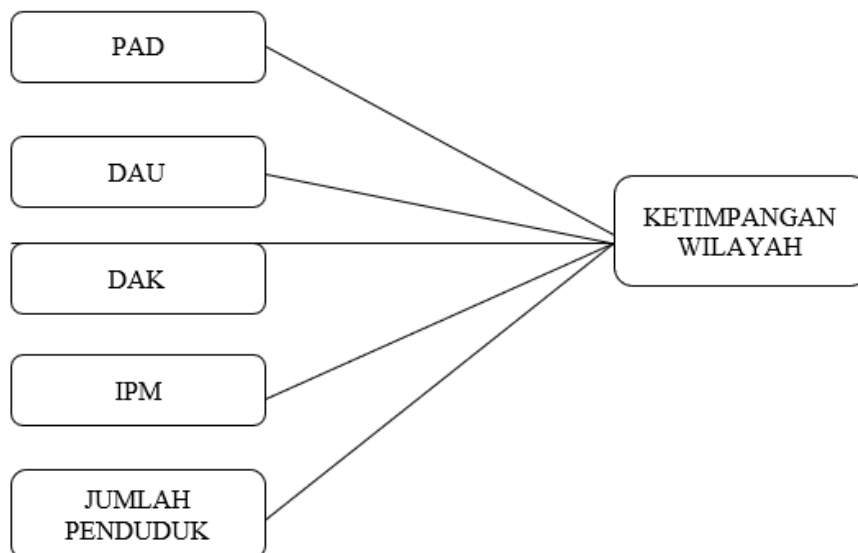
Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang didistribusikan ke daerah tertentu dengan tujuan membiayai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi dari DAK diberikan oleh pemerintah pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak memiliki akses yang memadai ke daerah lain. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi. Serta kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang kurang memadai.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) biasanya digunakan untuk mengelompokkan apakah suatu negara dikategorikan maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur hasil dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kondisi kelaparan bukan disebabkan selalu oleh kekurangan pangan tetapi bisa disebabkan oleh faktor tidak meratanya pembangunan, hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme distribusi dari faktor ekonomi dan sosial, Upah kerja yang mengalami penurunan, pengangguran, Meningkatnya harga dari bahan pangan. (Putra, 2019).

Rerangka Konseptual



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Penerimaan Asli Daerah Terhadap ketimpangan Wilayah

Menurut penelitian (Sidik, 2002) kemampuan suatu wilayah tergantung dari kondisi kekayaan sumber daya alamnya masing-masing daerah yang bersangkutan, apakah memiliki kekayaan sumber daya atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Pendapatan yang besar diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang kemudian digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan pada masing-masing daerah.

Menurut penelitian Menurut (Mutia, 2018) PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan pdi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara

H1 : Penerimaan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Wilayah

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan, 2007) DAU memberikan pengaruh negatif di empat daerah, yaitu Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang artinya penggunaan Dana Alokasi Umum di ke empat kabutan/kota tersebut belum optimal untuk memperbaiki disitribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan wilayah yang terjadi. Sementara menurut (Azizi, 2018) DAU mempengaruhi Ketimpangan secara negatif yang artinya semakin meningkat DAU akan menyebabkan ketimpangan wilayah mengalami peningkatan.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Ketimpangan Wilayah

Pada penelitian (M.Aziz, 2018) dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional Sulawesi Selatan pada tahun 2005 s/d 2014 dan menurut (M.Sidik et, al 2020) dalam menganalisa pengaruh DAK terhadap ketimpangan wilayah di Jambi mendapatkan hasil bahwa DAK berpengaruh negatif secara signifikan mengurangi disparitas di provinsi Jambi.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

Pengaruh Indeks Pembangunan Mahasiswa Terhadap Ketimpangan Wilayah

Menurut (Zusanty, 2020) secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, artinya ketika variabel IPM mengalami kenaikan 1 % kan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.104 %. Menurut (Nita, 2017) dalam penelitiannya IPM juga memberikan pengaruh negatif dan signifikan kepada ketimpangan pendapatan.

H4 : IPM berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil penelitian (Michael, 2020) jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah artinya semakin meningkat jumlah penduduk di suatu wilayah akan menurunkan ketimpangan antar wilayah. Menurut (Asrahmaulyana, 2023) dimana jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah.

H5 : Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

METODE

Tujuan dari penelitian untuk menganalisa dampak dari faktor penerimaan daerah terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2011 – 2020 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Artinya, penelitian ini dibentuk berdasarkan data yang bersumber pada data sekunder, jurnal, artikel, studi literatur dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan untuk melakukan analisis kuantitatif digunakan pendekatan metode panel data dengan menggunakan *software Eviews 9.0*.

Desain dari model yang akan dilakukan adalah model regresi linear dengan lima variabel bebas dan satu variabel terikat yakni ketimpangan wilayah. Spesifikasi model tersebut secara ekonometrika sebagai berikut:

$$CW_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PAD_{it} + \alpha_2 DAK_{it} + \alpha_3 DAU_{it} + \alpha_4 IPM_{it} + \alpha_5 JUMLAH\ PENDUDUK_t + e_{it}$$

yang mana:

CW : Ketimpangan Wilayah
PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JUMLAH PENDUDUK	
α_0	: Konstanta
α_1 s/d α_{10}	: Koefisien Variabel Independen
e	: <i>Residual/error</i>

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan data *pooling* yang merupakan data gabungan antara *time series* dan *cross section* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 untuk Jawa Tengah dan data didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan studi lainnya. Peneliti akan melakukan i menggunakan uji statistik dengan menggunakan *software Eviews 9.0*.

Metode Analisis Data

Analisa Model yang akan digunakan adalah model ekonometrika dengan metode panel Metode analisis yang dipakai dalam model adalah metode *unit root test*, estimasi model panel dan uji asumsi klasik.

Indeks Williamson

Ketimpangan pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indeks Wiliamson dan memakai data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk per daerah.

Kesenjangan wilayah antar provinsi Indonesia dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}}{Y}, 0 < IW < 1$$

dimana:

IW	: Indeks Williamson
Y_i	: Pendapatan per kapita daerah i
Y	: Pendapatan per kapita rata-rata seluruh daerah
F_i	: Jumlah penduduk daerah i
n	: Jumlah penduduk seluruh daerah

Angka indeks Williamson berada di range antara 0 sampai dengan satu, dimana ketimpangan semakin kecil jika angka mendekati nol artinya distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan berkebalikannya

Analisis Data Panel

Analisa regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Secara umum estimasi dalam analisis regresi dilakukan oleh pendugaan model kuadrat terkecil atau dikenal *Ordinary Least Square* (OLS). Data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel–variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted-variables*, model yang mengabaikan variabel yang relevan.

Regresi dengan menggunakan data panel biasa disebut model regresi data panel, dimana model ini memiliki beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, mampu menyediakan data yang

lebih lengkap karena adanya gabungan antara *time series* dan *cross section* sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, penggabungan kedua data tersebut dapat mengurangi timbulnya masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*).

Dalam Model estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Untuk menentukan model estimasi terbaik dilakukan uji kesesuaian model dengan Chow Test, Hausman Test dan Uji LM, dimana Common Effect Model (CEM) adalah pendekatan yang akan memberi asumsi bahwa intersep dari semua objek cross section adalah sama atau dengan kata lain strategi ini menggambarkan tidak ada perbedaan antara individu sepanjang waktu. Pada Fixed Effect Model (FEM) setiap individu memiliki nilai intercept sendiri, sementara di Random Effect Model (REM) akan mengevaluasi data panel dimana di model ini variabel gangguan dapat terjadi dengan adanya waktu. (Gujarati, 2012)

HASIL & PEMBAHASAN

Tabel 4.1. Hasil Uji Pengaruh Persamaan Indeks Williamson

Variabel	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Beta	P-Value	Beta	P-Value	Beta	P-Value
Konstanta	0.77566	0.0000	1.94200	0.0000	0.7156	0.0000
PAD (-)	-0.00231	0.0008	-0.00569	0.2471	-0.00331	0.2417
DAU (-)	-0.000331	0.0493	-0.000435	0.9954	-0.00217	0.9954
DAK (-)	-0.0217	0.0000	-0.0310	0.0000	-0.0228	0.0000
IPM (-)	-0.0008	0.0055	-0.01699	0.0000	0.00260	0.0000
JUMLAH PENDUDUK (+)	0.00260	0.0000	-0.00536	0.0007	-0.00231	0.0007
Goodness of Fit Test						
Adj R2	0.7253		0.9546		0.7254	
Prob F Stat	0.000		0.000		0.000	
Pemilihan Model						
Chow Test	Cross Section Chi Square		666.563		Individual Effect	
	P Value		0.0000			
Hausman Test	Cross Section Random		1.7771		Random Effect Mode	
	P Value		0.0000			

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil Chow Test didapatkan nilai probabilita sebesar $0.0000 < 0.05$ (alpha 5%) artinya H_a diterima H_0 ditolak, individual effect menjadi model terpilih yang diwakili oleh fixed effect model dan pengujian dilanjutkan ke uji Hausman. Hasil dari uji Hausman menggambarkan nilai probabilita dari Cross Section Random sebesar $0.000 < 0.05$ (H_a diterima), jadi model yang terbaik untuk mengestimasi persamaan Ketimpangan Wilayah dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien determinasi (adj R2) sebesar 0.7253 atau 72.53% yang memberikan pengertian kemampuan dari PAD, DAU dan DAK, IPM dan Jumlah Pengangguran dalam menjelaskan perilaku Ketimpangan Wilayah sebesar 72.53 % dan sebesar 27.43% dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak dimasukkan kedalam model. Hasil uji secara umum memperlihatkan nilai prob dari F_{stat} $0.0000 < 0.05$ (alpha 5%) dapat dikatakan secara statistik dengan tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat satu variabel independen dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera

Pengujian selanjutnya adalah melihat pengaruh PAD, DAU dan DAK, IPM dan Jumlah penduduk secara individu terhadap Indeks Williamson selama periode 2010-2020 Provinsi Jawa Tengah hasil pengujian sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh negatif PAD terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien PAD sebesar -0,00231 artinya jika PAD naik sebesar 1% maka Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera akan turun sebesar 0,00231 %. Hasil pengujian menunjukkan tanda koefisien sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana terdapat pengaruh negatif PAD terhadap Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah, tetapi tidak signifikan karena hasil pengujian menunjukkan nilai $(0,247) > 0,05$ (alpha 5%). Sesuai dengan penelitian (Debby Marantika, 2018), variabel PAD tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

H2: Terdapat pengaruh negatif DAU terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien DAU sebesar 0,00031 artinya jika DAU naik sebesar 1% maka ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah akan naik sebesar 0,0003%. Hasil penelitian menunjukkan variabel DAU memiliki nilai probabilitas $0,9554 > 0,05$ artinya variabel DAU tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah di provinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan penelitian (Oktaviani, 2017)

H3: Terdapat pengaruh negatif DAK terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien DAK sebesar -0,0217 artinya jika DAK naik sebesar 1% maka Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah akan turun sebesar 0.0217% . Hasil pengujian menunjukkan tanda koefisien sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana terdapat pengaruh negatif DAK terhadap Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah, maka pengujian signifikansi dilanjutkan kembali. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas $(0,0000) < 0,05$ (alpha 5%) maka variabel DAK signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

Untuk variabel DAK terlihat kontribusinya menurunkan ketimpangan wilayah, hal ini sejalan dengan pengalokasian dari DAK yang digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik di daerah, seperti alokasi infrastruktur, kesehatan, Pendidikan.

H4: Terdapat pengaruh negatif IPM terhadap Ketimpangan Wilayah

Hasil penelitian untuk variabel IPM menunjukkan hasil -0.0008, artinya IPM mengalami kenaikan sebesar 1 % akan mengakibatkan ketimpangan wilayah menurun sebesar 0.0008% Hasil pengujian menunjukkan tanda koefisien sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana terdapat pengaruh negatif IPM terhadap Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah. Untuk pengujian signifikansi menunjukkan nilai probabilitas $(0,0000) < 0,05$ (alpha 5%) artinya variabel IPM signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Menurut (Nurhuda, 2013) meningkatnya IPM dapat menurunkan ketimpangan wilayah di provinsi Jawa Tengah. IPM merupakan sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan untuk Indonesia IPM digunakan sebagai ukuran kinerja Pemerintah (BPS, Indeks Pembangunan 2020, 2020)

H5: Terdapat pengaruh negatif Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Wilayah

Hasil penelitian menunjukkan Jumlah penduduk memberikan pengaruh negatif dengan nilai sebesar -0.00260 artinya jika jumlah penduduk meningkat sebesar 1% akan menurunkan ketimpangan wilayah sebesar -0.00260% dengan nilai probabilitas sebesar $0.0007 < 0.5$. Variabel jumlah penduduk signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sesuai dengan penelitian (Michael, 2020) jumlah penduduk memiliki pengaruh negative terhadap ketimpangan wilayah dan penelitian (Asrahmaulyana, 2023) dimana jumlah penduduk memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah. Peningkatan jumlah penduduk di

kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah PDRB perkapita masing-masing kabupaten/kota, hal inilah yang mengakibatkan ketimpangan wilayah mengalami penurunan.

KESIMPULAN

Ketimpangan wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata diatas 0.5 dalam 10 tahun terakhir dengan angka tertinggi sebesar 0.777 pada tahun 2010 dan terendah di tahun 2020 dengan angka 0.698. Beberapa penyebab timbulnya ketimpangan wilayah adalah adanya perbedaan sumber daya alam antar kabupaten/kota, kualitas SDM dan fasilitas infrastruktur.

Dari lima variabel yang diuji dalam penelitian terdapat tiga variabel yang signifikan memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan wilayah, yaitu variabel DAK, IPM dan jumlah penduduk, sementara untuk variabel PAD dan DAU tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Untuk variabel DAU walaupun secara teori terbukti memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan tetapi tidak signifikan, karena nilai probabilitas diatas 0.5, Ini disebabkan karena penggunaan DAU lebih banyak digunakan untuk menutupi kesenjangan fiskal dibandingkan dengan menggunakan dana tersebut untuk pengembangan sektor potensial di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.

Serta untuk saran pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan, khususnya DAU untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah dan meningkatkan kualitas SDM agar dapat mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah yang terjadi.

Untuk penelitian selanjutnya perlu ditambah variabel lain yaitu investasi untuk melihat pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah, dengan melihat variabel DAU yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, V. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap ketimpangan Wilayah di Provinsi Jambi. *Khazanah Intelektual Volume 5 Nomor 2* , 1142-1160.
- Asrahmaulyana. (2023). Determinan Disparitas Wilayah Dikaitkan dengan Pertumbuhan Ekonomi. *Economics and Digital Business review*, 320-337.
- Azizi, M. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005-2014. *URNAL KRITIS VOLUME II NOMOR 1*, 1-32.
- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan 2020*. Jakarta: Biro Pusat Statistik .
- BPS. (2021, November). *Indeks Wiliamson Provinsis Jawa Tengah*. Retrieved from BPS.
- Debby Marantika, e. a. (2018). Disparitas Regional Antar Provinsi Di Indonesia 2011 – 2015 (. *Media Trend*, 31-46.
- Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economic Development Analysis Journal vol 5*, 106.
- Gujarati. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba 4.
- Hartati, Y. (2019). Analisa Disparitas Wilayah Antar Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Port Numbay Jayapura*.
- Herman Sambodo et al. (2020). Otonomi Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah : Bagaimanakah Dampak Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di Jawa Tengah? *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 149-159.
- Hermawan, D. (2007). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah. *DANKP DAERAH, D HERMAWAN - academia.edu*.

- Jannah, M. H. (2022). Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020.
- Juliana, R. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, PAD, IPM dan UMK terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 293-300.
- Lukman Harun, G. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah. *Jurnal Ilmiah FEB*.
- Michael, d. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kesenjangan Regional Antara Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat (2010-2018). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/182758/>.
- Muhamad Sidik, S. h. (2020). Dampak Alokasi Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap Tingkat Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.15.No.2*, 229-238.
- Mutia. (2018). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Repository Institusi Universitas Sumatera Utara*.
- Nita, H. (2017). Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015. *ePrints@UNY*.
- Nurhuda, R. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). 1.
- Oktaviani, W. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol 6 No 3*, 105-112.
- Putra, W. (2019). *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok: Pt Rahagrafindo Persada.
- Raden Annisa et, a. (2020). Analisis Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2019 dengan Metode Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Location Quotient. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara*, 339-349.
- Rizkia, C. T. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten-Kabupaten Wilayah Timur Provinsi Aceh. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi (JAIE) (Vol 2)*, 38-48.
- Sarfiah, F. S. (2019). Analisis Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (2008-2017). *Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 4 Tahun 2019*, 399-417.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi* (Vol. 1). Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Todaro, M. d. (2003). *Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Yerikha Christi Gratia, N. S. (2020). Analisis Ketimpangan Antar Wilayah di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31532>, 31-40.
- Violin, Z. I., & Lutfi, M. Y. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa dan Faktor yang Mempengaruhinya Tahun 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 227-252. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i1.14740>
- Zusanty, R. D. (2020). Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan TPT terhadap Ketimpangan Wilayah di pulau jawa 2010-2018. *Dinamic*.

DETERMINASI KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH (2010- 2020)

by Mona Adriana

Submission date: 16-Dec-2025 10:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 2847299176

File name: DETERMINASI_KETIMPANGAN_WILAYAH_KABUPATENKOTA_PROVINSI_JAWA_TENGAH_2010-2020_.pdf (380.96K)

Word count: 4910

Character count: 31407

42
**DETERMINASI KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH (2010-2020)**

Mona Adriana^{1*}

50
¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

*Penulis korespondensi: mona.as@trisakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 -220 dengan menggunakan indeks Willamson sebagai variabel terikat dan PAD, DAU, DAK, IPM, jumlah menjadi independen variabel . Alat analisa yang digunakan adalah regresi OLS dan data panel. Berdasarkan hasil penelitian, model terbaik adalah Random Effect Model (REM) dan secara simultan PAD, DAU, DAK, IPM dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah sebesar 72,53% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Secara parsial variabel DAK, IPM, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan untuk PAD, DAU terbukti tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Ketimpangan, PAD, DAU, DAK, IPM, Jumlah Penduduk

Abstract

The aim of this study was to analyze the factors that influence regional inequality in Central Java Province from 2010 -220 by using the Willamson index as the dependent variable and PAD, DAU, DAK, IPM, the amount as the independent variable. The analytical method used is OLS regression and panel data. Based on the research results, the best model is the Random Effect Model (REM) and simultaneously PAD, DAU, DAK, HDI and population have a significant effect on regional inequality of 72.53% and the rest are influenced by other variables not present in the study. Partially the variables DAK, HDI, and population have a significant effect on inequality, while for PAD, DAU is proven not to affect regional inequality in East Java province.

Keywords: Inequality, PAD, DAU, DAK, HDI, Population

Artikel dikirim: 26-07-2024

Artikel Revisi: 26-07-2024

Artikel diterima: 14-03-2024

PENDAHULUAN

35
41
Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki ciri berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya yang berdampak dengan timbulnya perbedaan pola pembangunan di Indonesia. Perbedaan ini menjadikan kemampuan atau potensi wilayah menjadi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dimana ada wilayah yang mengalami pertumbuhan dengan cepat sementara wilayah lain tumbuh dengan lambat. Perbedaan kemampuan untuk tumbuh inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan antar wilayah (Yerikha Christi Gratia, 2020).

Ketimpangan ini dapat menimbulkan banyak permasalahan salah satunya adalah meningkatnya migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju dan akan menimbulkan

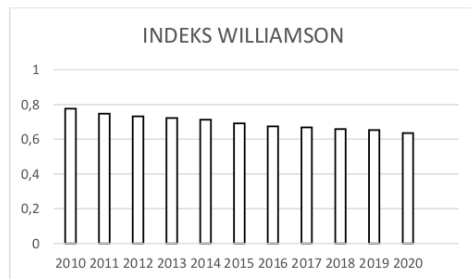
Jurnal Ekonomi Trisakti

permasalahan baru seperti konflik antar masyarakat dan meningkatnya konflik antar masyarakat (Sarfiyah, 2019)

Menurut pandangan teori Neo Klasik ketimpangan wilayah terjadi dikarenakan adanya perbedaan faktor-faktor produksi, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi dimana akibatnya mendorong proses pembangunan menjadi berbeda dimana ada daerah yang disebut maju dan daerah tertinggal. (Lukman Harun, 2012)

Sementara menurut (Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, 2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi disparitas daerah, yaitu 1) Sumber daya alam, 2) angkatan kerja 3) alokasi dana bentuk penanaman dana investasi, 4) kegiatan ekonomi.

Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota yang terletak di pulau Jawa dan tidak pula terlepas dari permasalahan ketimpangan wilayah yang harus diatasi dimana aspek pemerataan pendapatan menjadi tujuan utama dari pembangunan di Jawa Tengah. Ketimpangan wilayah sendiri jika dilihat dari indeks Williamson berada di angka yang cukup tinggi, yaitu lebih besar dari 0.5 Beberapa langkah telah dilakukan untuk menurunkan disparitas, hal ini terlihat dari angka indeks Williamson yang mengalami penurunan dari sebesar 0.777 sampai akhirnya di tahun 2020 mencapai angka 0.698 (BPS, Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah, 2021)



Gambar 1. Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2020

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan antara kabupaten/kota adalah sumber daya alam kondisi infrastruktur yang berbeda-beda dimana hal tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapatan. Salah satunya adalah di Kabupaten Kudus yang memiliki PDRB Perkapita cukup tinggi karena memiliki beberapa perusahaan besar nasional yang beroperasi di sana. Hal yang sama dialami oleh Kota Semarang yang memiliki berbagai fasilitas infrastruktur seperti pelabuhan antar pulau dan bandara internasional dan menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah.

Perencanaan dan manajemen pembangunan yang dilakukan oleh beberapa daerah dengan baik menyebabkan timbulnya beberapa kawasan ekonomi yang strategis dan dengan melihat kondisi kabupaten/kota dari sisi sumber daya alam yang berbeda menjadi beberapa faktor yang

menimbulkan ketimpangan di provinsi tersebut. Ketimpangan yang terjadi memberikan dampak meningkatnya arus urbanisasi, tingkat pengangguran, kemiskinan yang meningkat, disisi lain timbulnya ketidakseimbangan kualitas dari SDM serta ketersediaan teknologi (BPS, Indeks Wiliamson Provinsis Jawa Tengah, 2021)

Menurut (Raden Annisa et, 2020) ketimpangan wilayah di Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya perpindahan tenaga kerja dan memiliki pendidikan baik ke daerah yang lebih maju ; aliran penanaman modal ke kabupaten/kota yang maju atau berkembang yang disebabkan oleh faktor kondisi pasar, kesempatan kerja dan lokasi. Di sisi lain adanya kebijakan pemerintah yang cenderung teralokasi di daerah maju.

Alokasi investasi yang berbeda antara kabupaten/kota disebabkan oleh para investor lebih memilih wilayah dengan fasilitas yang baik, seperti sarana dan pra sarana perhubungan, jaringan listrik yang memadai, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, asuransi dan di sisi lain kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu pertimbangan investor ingin menempatkan dana di sebuah lokasi. Hal ini lah yang akan menimbulkan ketimpangan wilayah dimana untuk daerah yang tidak memiliki fasilitas akan semakin tertinggal.

Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan wilayah dengan memberikan wewenang secara penuh kepada daerah untuk merencanakan anggaran pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan potensi daerah, membangun infrastruktur sesuai kebutuhan daerah agar pembangunan. Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari daerah tersebut. Sementara untuk membangun kebutuhan infrastruktur pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun dari beberapa penelitian menggambarkan bahwa kebijakan otonomi daerah dapat meningkatkan ketimpangan wilayah, dimana untuk daerah yang memiliki sumber daya , alokasi DAU dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sementara untuk beberapa daerah yang tidak kaya akan sumber daya , alokasi DAU tidak mampu meningkatkan PAD daerahnya. Menurut (Azizi, 2018) dalam penelitiannya mengenai dampak DAU terhadap ketimpangan wilayah menyatakan bahwa DAU memberikan dampak positif dan signifikan kepada ketimpangan di provinsi Sulawesi Selatan, hal ini menggambarkan jika alokasi DAU ditingkatkan akan mengakibatkan semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut. Hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mutia, 2018) bahwa DAU memberikan dampak positif terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan, 2007) DAU memberikan dampak secara positif 4 kabupaten/kota , yaitu Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang artinya penggunaan Dana Alokasi Umum di ke empat

Jurnal Ekonomi Trisakti

kabupaten/kota tersebut belum optimal untuk memperbaiki distribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan wilayah yang terjadi.

Berbeda ketika dilihat dari sisi penggunaan Dana Alokasi Khusus yang memang salah satu tujuan utama dari alokasi dana tersebut adalah untuk meningkatkan infrastruktur daerah dan pada akhirnya memberikan dampak peningkatan pendapatan daerah. (Muhamad Sidik, 2020) dalam penelitiannya peran DAK menurunkan ketimpangan daerah di provinsi Jambi, dimana semakin besarnya proporsi dari DAK yang diberikan maka akan menurunkan ketimpangan wilayah. Hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azizi, 2018) dimana DAK memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan wilayah adalah dari sisi Makro ekonomi, menurut (Herman Sambodo et al, 2020) disparitas yang tinggi untuk mencapai PDRB disebabkan oleh jumlah pengangguran, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, angka partisipasi kasar Pendidikan dan indeks kesehatan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah alat ukur untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia, semakin tinggi IPM sebuah daerah maka menunjukkan proses pembangunan di daerah tersebut berhasil. (BPS, Indeks Pembangunan 2020, 2020). Menurut (Zusanty, 2020) IPM memberikan pengaruh negative terhadap ketimpangan antar daerah, dimana nilai konstanta IPM -0.104 menjelaskan Jika IPM naik sebesar 1 % akan memberikan dampak turunya ketimpangan sebesar 0.104 %. Sementara menurut penelitian (Nurhuda, 2013) menemukan bahwa peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Jumlah Penduduk merupakan salah satu faktor pula yang mempengaruhi ketimpangan wilayah, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan memberikan dampak turunya ketimpangan wilayah. Berdasarkan hasil penelitian (Michael, 2020) jumlah penduduk memiliki pengaruh negative terhadap ketimpangan wilayah, hal yang sama dengan penelitian (Asrahmaulyana, 2023) dimana jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah.

Dengan melihat terdapatnya beberapa variabel yang memberikan dampak terhadap ketimpangan wilayah, penulis memandang perlu untuk melakukan analisa mengenai determinasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Pembangunan Daerah.

Pembangunan ekonomi prioritas utamanya adalah untuk mengurangi disparitas antar wilayah, dimana meningkatnya pendapatan perkapita menggambarkan tumbuhnya perekonomian suatu daerah hanya saja di sisi lain dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Ketimpangan akan terjadi jika ternyata besarnya pendapatan nasional tidak dapat diikmati secara merata stau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

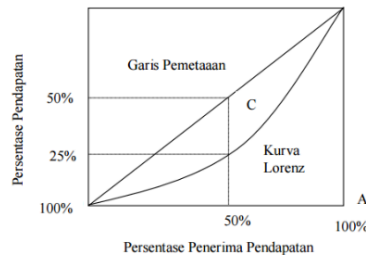
Beberapa bentuk ketimpangan adalah:

➤ *Distribution Income Disparities*

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya adalah sbb:

Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dengan menggunakan Kurva Lorenz, dalam hal ini kurva akan memperlihatkan hubungan secara kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total yang diterima selama satu periode tertentu.



Gambar 2.1. Kurva Lorenz

Bentuk Kurva Lorenz akan digambarkan dalam sebuah kotak dimana garis horizontalnya menggambarkan persentase penduduk penerima pendapatan dan garis vertikalnya menggambarkan persentase pendapatan. Ketimpangan wilayah semakin rendah, jika kurva memiliki bentuk yang semakin mendekat dengan diagonalnya berarti ketimpangan dan jika kurva menjauh dari diagonal maka ketimpangan akan meningkat. Beberapa bentuk dari Kurva Lorenz adalah: 50% penduduk yang menerima pendapatan akan memperoleh sebesar 50% jika kurva Lorenz diagonal OA atau dengan kata lain pembagian pendapatan rata secara sempurna. Serta 50% penduduk yang paling bawah mendapatkan 5% pendapatan dapat dikatakan memiliki pendapatan cukup (bentuk kurva Lorenz sisi siku OCA). Kurva Lorenz dengan sisi siku OBA menggambarkan 100% dari jumlah penduduk tidak mendapatkan pendapatan.

Jika pembangunan akan direncanakan terus berlanjut dengan didukung oleh semakin baniknya fasilitas sarana dan prasarana maka mobilitas faktor produksi akan semakin lancar dan akan memberikan dampak berkurangnya kesenjangan ekonomi antar (*convergen*). Keadaan tersebut dapat digambarkan dalam sebuah kurva dengan bentuk “U” terbalik.



Gambar 2.2 .Kurva Kuznetz

Hipotesa dari neo klasik yang telah diuji kebenarannya oleh Jeffrey G.Williamson (1966) melalui sebuah studi tentang kesenjangan ekonomi antara wilayah di negara maju dengan sedang berkembang memakai data time series dan cross section. Dari penelitian menunjukkan bahwa hipotesa tersebut terbukti secara empiris, artinya sebuah proses pembangunan suatu negara tidak secara otomatis adapat menurunkan kesenjangan ekonomi antara wilayah dan di tahap awal dan berlaku sebaliknya (Sjafrizal, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, 2008)

▪ **Teori Kuznets (Hipotesis U Terbalik)**

Hipotesa yang dibuat oleh Simon Kusnetz dalam bentuk kurva U terbalik menggambarkan bahwa pada awal pembangunan dimulai akan mengakibatkan timbulnya distribusi pendapatan yang tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan akan menjadi semakin merata. Berdasarkan historis pembangunan di negara maju terlihat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi membuat distribusi pendapatan cenderung tidak baik, namun pada tahap berikutnya distribusi pendapatan akan membaik.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang didistribusikan dengan tujuan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pelaksanaan dari desentralisasi fiskal dari sisi DAU bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan di daerahnya dimana daerah memiliki otoritas penuh menggunakan dana tersebut sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah.

DAU diberikan dalam bentuk *block grant* untuk kabupaten/kota untuk memenuhi disparitas fiskal yang dialami oleh daerah dimana dalam mendistribusikannya menggunakan formula yang didasarkan kepada teori-teori tertentu yang secara umum menggambarkan daerah yang belum berkembang mendapatkan DAU sesuai kebutuhannya atau dengan kata lain melalui DAU diharapkan kesanggupan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah menjadi semakin merata.

DAU sendiri dapat diartikan sebagai unsur dari dana perimbangan yang metode pengalokasiannya berdasarkan celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Perangkat yang digunakan untuk mengatasi keseimbangan horisontal yaitu kesetaraan kemampuan keuangan antar daerah dan pemanfaatannya ditentukan secara penuh oleh daerah. Serta *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menentralisasi ketimpangan kemampuan keuangan, dimana besarnya DAU untuk daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

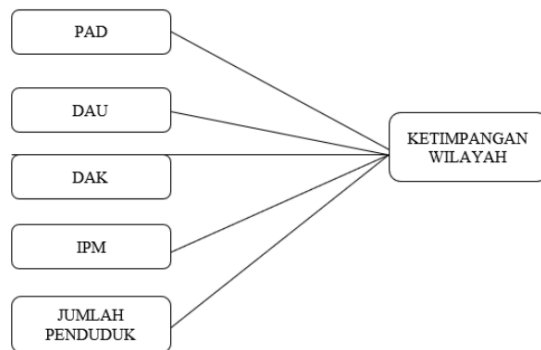
Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang didistribusikan ke daerah tertentu dengan tujuan membiayai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi dari DAK diberikan oleh pemerintah pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak memiliki akses yang memadai ke daerah lain. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi. Serta kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang kurang memadai.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) biasanya digunakan untuk mengelompokkan apakah suatu negara dikategorikan maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur hasil dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kondisi kelaparan bukan disebabkan selalu oleh kekurangan pangan tetapi bisa disebabkan oleh faktor tidak meratanya pembangunan, hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme distribusi dari faktor ekonomi dan sosial, Upah kerja yang mengalami penurunan, pengangguran, Meningkatnya harga dari bahan pangan. (Putra, 2019).

Rerangka Konseptual



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Penerimaan Asli Daerah Terhadap ketimpangan Wilayah

Menurut penelitian (Sidik, 2002) kemampuan suatu wilayah tergantung dari kondisi kekayaan sumber daya alamnya masing-masing daerah yang bersangkutan, apakah memiliki kekayaan sumber daya atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Pendapatan yang besar diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang kemudian digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan pada masing-masing daerah.

Menurut penelitian Menurut (Mutia, 2018) PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

H1 : Penerimaan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Wilayah

Jurnal Ekonomi Trisakti

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan, 2007) DAU memberikan pengaruh negatif di empat daerah, yaitu Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang artinya penggunaan Dana Alokasi Umum di ke empat kabutan/kota tersebut belum optimal untuk memperbaiki distribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan wilayah yang terjadi. Sementara menurut (Azizi, 2018) DAU mempengaruhi Ketimpangan secara negatif yang artinya semakin meningkat DAU akan menyebabkan ketimpangan wilayah mengalami peningkatan.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Ketimpangan Wilayah

Pada penelitian (M.Aziz, 2018) dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional Sulawesi Selatan pada tahun 2005 s/d 2014 dan menurut (M.Sidik et.al 2020) dalam menganalisa pengaruh DAK terhadap ketimpangan wilayah di Jambi mendapatkan hasil bahwa DAK berpengaruh negatif secara signifikan mengurangi disparitas di provinsi Jambi.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

Pengaruh Indeks Pembangunan Mahasiswa Terhadap Ketimpangan Wilayah

Menurut (Zusanty, 2020) secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, artinya ketika variabel IPM mengalami kenaikan 1 % akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.104 %. Menurut (Nita, 2017) dalam penelitiannya IPM juga memberikan pengaruh negatif dan signifikan kepada ketimpangan pendapatan.

H4 : IPM berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil penelitian (Michael, 2020) jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah artinya semakin meningkat jumlah penduduk di suatu wilayah akan menurunkan ketimpangan antar wilayah. Menurut (Asrahmaulyana, 2023) dimana jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah.

H5 : Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan antar Wilayah

METODE

Tujuan dari penelitian untuk menganalisa dampak dari faktor penerimaan daerah terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2011 – 2020 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Artinya, penelitian ini dibentuk berdasarkan data yang bersumber pada data sekunder, jurnal, artikel, studi literatur dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan untuk melakukan analisis kuantitatif digunakan pendekatan metode panel data dengan menggunakan software Eviews 9.0.

Desain dari model yang akan dilakukan adalah model regresi linear dengan lima variabel bebas dan satu variabel terikat yakni ketimpangan wilayah. Spesifikasi model tersebut secara ekonometrika sebagai berikut:

$$CW_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PAD_{it} + \alpha_2 DAK_{it} + \alpha_3 DAU_{it} + \alpha_4 IPM_{it} + \alpha_5 JUMLAH\ PENDUDUK_{it} + e_{it}$$

yang mana:

CW : Ketimpangan Wilayah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAK : Dana Alokasi Khusus
 DAU : Dana Alokasi Umum
 IPM : Indeks Pembangunan Manusia
 JUMLAH PENDUDUK
 α_0 : Konstanta
 α_1 s/d α_{10} : Koefisien Variabel Independen
 e : Residual/error

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan data *pooling* yang merupakan data gabungan antara *time series* dan *cross section* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 untuk Jawa Tengah dan data didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan studi lainnya. Peneliti akan melakukan i menggunakan uji statistik dengan menggunakan *software Eviews 9.0*.

Metode Analisis Data

Analisa Model yang akan digunakan adalah model ekonometrika dengan metode panel. Metode analisis yang dipakai dalam model adalah metode *unit root test*, estimasi model panel dan uji asumsi klasik.

Indeks Williamson

Ketimpangan pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indeks Williamson dan memakai data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk per daerah.

Kesenjangan wilayah antar provinsi Indonesia dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \frac{F_i}{n}}}{Y}, 0 < IW < 1$$

dimana:

IW : Indeks Williamson
 Y_i : Pendapatan per kapita daerah i
 Y : Pendapatan per kapita rata-rata seluruh daerah
 F_i : Jumlah penduduk daerah i
 n : Jumlah penduduk seluruh daerah

Angka indeks Williamson berada di range antara 0 sampai dengan satu, dimana ketimpangan semakin kecil jika angka mendekati nol artinya distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan berkebalikannya.

Analisis Data Panel

Analisa regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Secara umum estimasi dalam analisis regresi dilakukan oleh pendugaan model kuadrat terkecil atau dikenal *Ordinary Least Square* (OLS). Data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted-variables*, model yang mengabaikan variabel yang relevan.

Regresi dengan menggunakan data panel biasa disebut model regresi data panel, dimana model ini memiliki beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, mampu menyediakan data yang

Jurnal Ekonomi Trisakti

lebih lengkap karena adanya gabungan antara *time series* dan *cross section* sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, penggabungan kedua data tersebut dapat mengurangi timbulnya masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*).

Dalam Model estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Untuk menentukan model estimasi terbaik dilakukan uji kesesuaian model dengan Chow Test, Hausman Test dan Uji LM, dimana *Comment Effect Model (CEM)* adalah pendekatan yang akan memberi asumsi bahwa intersep dari semua objek *cross section* adalah sama atau dengan kata lain strategi ini menggambarkan tidak ada perbedaan antara individu sepanjang waktu. Pada *Fixed Effect Model (FEM)* setiap individu memiliki nilai intersep sendiri, sementara di *Random Effect Model (REM)* akan mengevaluasi data panel dimana di model ini variabel gangguan dapat terjadi dengan adanya waktu. (Gujarati, 2012)

HASIL & PEMBAHASAN

Tabel 4.1. Hasil Uji Pengaruh Persamaan Indeks Williamson

	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
Variabel	Beta	P-Value	Beta	P-Value	Beta	P-Value
Konstanta	0.77566	0.0000	1.94200	0.0000	0.7156	0.0000
PAD (-)	-0.00231	0.0008	-0.00569	0.2471	-0.00331	0.2417
DAU (-)	-0.000331	0.0493	-0.000435	0.9954	-0.00217	0.9954
DAK (-)	-0.0217	0.0000	-0.0310	0.0000	-0.0228	0.0000
IPM (-)	-0.0008	0.0055	-0.01699	0.0000	0.00260	0.0000
JUMLAH PENDUDUK (+)	0.00260	0.0000	-0.00536	0.0007	-0.00231	0.0007
Goodness of Fit Test						
Adj R2	0.7253		0.9546		0.7254	
Prob F Stat	0.000		0.000		0.000	
Pemilihan Model						
Chow Test	Cross Section Chi Square		666.563		Individual Effect	
	P Value		0.0000			
Hausman Test	Cross Section Random		1.7771		Random Effect Mode	
	P Value		0.0000			

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil Chow Test didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ (alpha 5%) artinya H_0 diterima H_0 ditolak, individual effect menjadi model terpilih yang diwakili oleh fixed effect model dan pengujian dilanjutkan ke uji Hausman. Hasil dari uji Hausman menggambarkan nilai probabilitas dari Cross Section Random sebesar $0.000 < 0.05$ (H_0 diterima), jadi model yang terbaik untuk mengestimasi persamaan Ketimpangan Wilayah dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien determinasi (adj R2) sebesar 0.7253 atau 72.53% yang memberikan pengertian kemampuan dari PAD, DAU dan DAK, IPM dan Jumlah Pengangguran dalam menjelaskan perilaku Ketimpangan Wilayah sebesar 72.53 % dan sebesar 27.43% dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak dimasukkan kedalam model. Hasil uji secara umum memperlihatkan nilai prob dari F_{stat} $0.0000 < 0.05$ (alpha 5%) dapat dikatakan secara statistik dengan tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat satu variabel independen dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera

Pengujian selanjutnya adalah melihat pengaruh PAD, DAU dan DAK, IPM dan Jumlah penduduk secara individu terhadap Indeks Williamson selama periode 2010-2020 Provinsi Jawa Tengah hasil pengujian sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh negatif PAD terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien PAD sebesar -0,00231 artinya jika PAD naik sebesar 1% maka Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera akan turun sebesar 0,00231 %. Hasil pengujian menunjukkan tanda koefisien sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana terdapat pengaruh negatif PAD terhadap Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah, tetapi tidak signifikan karena hasil pengujian menunjukkan nilai $(0,247) > 0,05$ (alpha 5%). Sesuai dengan penelitian (Debby Marantika, 2018), variabel PAD tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

H₂: Terdapat pengaruh negatif DAU terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien DAU sebesar 0,00031 artinya jika DAU naik sebesar 1% maka ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah akan naik sebesar 0,00031%. Hasil penelitian menunjukkan variabel DAU memiliki nilai probabilitas $0,9554 > 0,05$ artinya variabel DAU tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah di provinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan penelitian (Oktaviani, 2017)

H₃: Terdapat pengaruh negatif DAK terhadap Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai koefisien DAK sebesar -0,0217 artinya jika DAK naik sebesar 1% maka Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah akan turun sebesar 0,0217%. Hasil pengujian menunjukkan tanda koefisien sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana terdapat pengaruh negatif DAK terhadap Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah, maka pengujian signifikansi dilanjutkan kembali. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas $(0,0000) < 0,05$ (alpha 5%) maka variabel DAK signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

Untuk variabel DAK terlihat kontribusinya menurunkan ketimpangan wilayah, hal ini sejalan dengan pengalokasian dari DAK yang digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik di daerah, seperti alokasi infrastruktur, kesehatan, Pendidikan.

H₄: Terdapat pengaruh negatif IPM terhadap Ketimpangan Wilayah

Hasil penelitian untuk variabel IPM menunjukkan hasil -0,0008, artinya IPM mengalami kenaikan sebesar 1 % akan mengakibatkan ketimpangan wilayah menurun sebesar 0,0008%. Hasil pengujian menunjukkan tanda koefisien sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana terdapat pengaruh negatif IPM terhadap Ketimpangan Wilayah di provinsi Jawa Tengah. Untuk pengujian signifikansi menunjukkan nilai probabilitas $(0,0000) < 0,05$ (alpha 5%) artinya variabel IPM signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Menurut (Nurhuda, 2013) meningkatnya IPM dapat menurunkan ketimpangan wilayah di provinsi Jawa Tengah. IPM merupakan sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan untuk Indonesia IPM digunakan sebagai ukuran kinerja Pemerintah (BPS, Indeks Pembangunan 2020, 2020)

H₅: Terdapat pengaruh negatif Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Wilayah

Hasil penelitian menunjukkan Jumlah penduduk memberikan pengaruh negatif dengan nilai sebesar -0,00260 artinya jika jumlah penduduk meningkat sebesar 1% akan menurunkan ketimpangan wilayah sebesar -0,00260% dengan nilai probabilitas sebesar $0,0007 < 0,05$. Variabel jumlah penduduk signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sesuai dengan penelitian (Michael, 2020) jumlah penduduk memiliki pengaruh negative terhadap ketimpangan wilayah dan penelitian (Asrahmaulyana, 2023) dimana jumlah penduduk memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah. Peningkatan jumlah penduduk di

kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah PDRB perkapita masing-masing kabupaten kota, hal inilah yang mengakibatkan ketimpangan wilayah mengalami penurunan.

KESIMPULAN

Ketimpangan wilayah kabupaten /kota di provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata diatas 0.5 dalam 10 tahun terakhir dengan angka tertinggi sebesar 0.777 pada tahun 2010 dan terendah di tahun 2020 dengan angka 0.698. Beberapa penyebab timbulnya ketimpangan wilayah adalah adanya perbedaan sumber daya alam antar kabupaten kota, kualitas SDM dan fasilitas infrastruktur.

Dari lima variabel yang diuji dalam penelitian terdapat tiga variabel yang signifikan memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan wilayah, yaitu variabel DAK, IPM dan jumlah penduduk, sementara untuk variabel PAD dan DAU tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Untuk variabel DAU walaupun secara teori terbukti memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan tetapi tidak signifikan, karena nilai probabilita diatas 0.5. Ini disebabkan karena penggunaan DAU lebih banyak digunakan untuk menutupi kesenjangan fiskal dibandingkan dengan menggunakan dana tersebut untuk pengembangan sektor potensial di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.

Serta untuk saran pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan, khususnya DAU untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah dan meningkatkan kualitas SDM agar dapat mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah yang terjadi.

Untuk penelitian selanjutnya perlu ditambah variabel lain yaitu investasi untuk melihat pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah, dengan melihat variabel DAU yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, V. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap ketimpangan Wilayah di Provinsi Jambi. *Khazanah Intelektual Volume 5 Nomor 2* , 1142-1160.
- Asrahmaulyana. (2023). Determinan Disparitas Wilayah Dikaitkan dengan Pertumbuhan Ekonomi. *Economics and Digital Business review*, 320-337.
- Azizi, M. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005-2014. *URNAL KRITIS VOLUME II NOMOR 1* , 1-32.
- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan 2020*. Jakarta: Biro Pusat Statistik .
- BPS. (2021, November). *Indeks Williams Provisins Jawa Tengah*. Retrieved from BPS.
- Debby Marantika, e. a. (2018). Disparitas Regional Antar Provinsi Di Indonesia 2011 – 2015 (. *Media Trend*, 31-46.
- Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economic Development Analysis Journal vol 5*, 106.
- Gujarati. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba 4.
- Hartati, Y. (2019). Analisa Disparitas Wilayah Antar Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Port Numbay Jayapura*.
- Herman Sambodo et al. (2020). Otonomi Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah : Bagaimanakah Dampak Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di Jawa Tengah? *Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 149-159.
- Hermawan, D. (2007). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah. *DANKP DAERAH, D HERMAWAN - academia.edu*.

- Jannah, M. H. (2022). Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020.
- Juliana, R. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, PAD, IPM dan UMK terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 293-300.
- Lukman Harun, G. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah. *Jurnal Ilmiah FEB*.
- Michael, d. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kesenjangan Regional Antara Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat (2010-2018). <http://repository.ub.ac.id/eprint/182758/>.
- Muhamad Sidik, S. h. (2020). Dampak Alokasi Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap Tingkat Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.15.No.2*, 229-238.
- Mutia. (2018). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*.
- Nita, H. (2017). Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015. *ePrints@UNY*.
- Nurhuda, R. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *1*.
- Oktaviani, W. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol 6 No 3*, 105-112.
- Putra, W. (2019). *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok: Pt Rahagrafindo Persada.
- Raden Annisa et, a. (2020). Analisis Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2019 dengan Metode Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Location Quotient. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara*, 339-349.
- Rizkia, C. T. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten-Kabupaten Wilayah Timur Provinsi Aceh. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi (JAIE) (Vol 2)*, 38-48.
- Sarfiah, F. S. (2019). Analisis Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (2008-2017). *Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 4 Tahun 2019*, 399-417.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi* (Vol. 1). Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Todaro, M. d. (2003). *Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Yerikha Christi Gratia, N. S. (2020). Analisis Ketimpangan Antar Wilayah di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31532>, 31-40.
- Violin, Z. I., & Lutfi, M. Y. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa dan Faktor yang Mempengaruhinya Tahun 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 227-252. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i1.14740>
- Zusanty, R. D. (2020). Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan TPT terhadap Ketimpangan Wilayah di pulau jawa 2010-2018. *Dinamic*.

DETERMINASI KETIMPANGAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH (2010-2020)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	1 %
2	Submitted to Business and Economics Student Paper	1 %
3	Anastasia Yolanda Putri br Jawak, Irsad Lubis. "Pengaruh Corporate Environmental Performance dan Intellectual Capital terhadap Sustainability Reporting dengan Good Corporate Governance Sebagai Moderasi", Jurnal Maneksi, 2023 Publication	1 %
4	I Komang Mahendra Kesuma, I Nyoman Mahaendra Yasa. "DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2025 Publication	1 %
5	Submitted to Trisakti University Student Paper	1 %
6	ejournal.iaiskjmalang.ac.id Internet Source	1 %
7	jurnal.stmik-mi.ac.id Internet Source	<1 %
8	bappeda.kaltimprov.go.id Internet Source	<1 %
9	Wahyu Indah Puspitasari. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI TENAGA	<1 %

KERJA KE LUAR NEGERI BERDASARKAN
PROVINSI DI INDONESIA", Jurnal Ilmu
Ekonomi Terapan, 2017

Publication

-
- | | | |
|----|--|------|
| 10 | pekalongankab.bps.go.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 11 | mafiadoc.com
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 12 | Submitted to Coventry University
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 13 | Submitted to Universitas Islam Riau
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 14 | Erma Setiawati, Rina Trisnawati, Ph.D, Siti Nurhayati Ning Rahayu. "Phenomenology of Bourdieu's Theory of Practice: The Relationship Between the Budgeting Process and Culture", Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2023
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 15 | Submitted to Universitas Dian Nuswantoro
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 16 | Submitted to Washoe County School District
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 17 | fdocuments.net
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 18 | Maretha Berlianantiya. "Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2017
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 19 | fullpaper.blogspot.com
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-

20	slideplayer.info Internet Source	<1 %
21	inspirasi hukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	library.poltekkesdepkes-sby.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.unand.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to SDM Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
25	bumidesember.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	research.kalbis.ac.id Internet Source	<1 %
27	villages.pubmedia.id Internet Source	<1 %
28	Gaby Dainty Juliet Roring, Nadya Lestari Vega Br. Ginting, Dasyat Imanuel Rombon. "ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2025 Publication	<1 %
29	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III Student Paper	<1 %
30	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
31	jurnal.umat.ac.id Internet Source	<1 %
32	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	<1 %

33	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Universitas Ngurah Rai Student Paper	<1 %
35	bella-kurniawati-dewi-fst15.web.unair.ac.id Internet Source	<1 %
36	cdn-gbelajar.simpkb.id Internet Source	<1 %
37	repository.uniba.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
39	sistemasi.ftik.unisi.ac.id Internet Source	<1 %
40	www.halobayi.id Internet Source	<1 %
41	asepmahpudz.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	enrichment.iocspublisher.org Internet Source	<1 %
43	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
44	jpwp.jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %
45	junaidichaniago.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	linter.untar.ac.id Internet Source	<1 %
47	mail.online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %

48

Internet Source

<1 %

49

repository.ung.ac.id

Internet Source

<1 %

50

Bondan Noviantoro, Emilia Emilia, Yohanes Vyn Amzar. "Pengaruh harga CPO, harga minyak mentah dunia, harga karet dunia dan kurs terhadap defisit neraca transaksi berjalan Indonesia", Jurnal Paradigma Ekonomika, 2017

Publication

<1 %

51

baixardoc.com

Internet Source

<1 %

52

ejournal.undaris.ac.id

Internet Source

<1 %

53

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

54

jdih.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

55

kemensos.go.id

Internet Source

<1 %

56

ojs.unm.ac.id

Internet Source

<1 %

57

ppid.pemalangkab.go.id

Internet Source

<1 %

58

Mayang Dwi Pitaloka, P.S Prabowo. "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN TERHADAP IPM 14 KABUPATEN KATEGORI "SEDANG" DI PROVINSI JAWA TIMUR", JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2022

Publication

<1 %

59 Nurilmih Nurilmih, Junaidin Zakaria, Dahlia Baharuddin. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri, dan Belanja Modal terhadap Industri Pengolahan dan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan", Journal on Education, 2023

Publication

60 Ica Romiyati, Yulmardi Yulmardi, Adi Bhakti. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di Kota Jambi", Jurnal Paradigma Ekonomika, 2019

Publication

61 Serly Eka Fitriyani, Hesty Erviani Zulaecha. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Konsentrasi Kepemilikan, dan Reputasi Auditor Terhadap Enterprise Risk Management dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025

Publication

62 Sugeng Setyadi. "DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH: STUDI DI TUJUH NEGARA ASEAN", Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 2017

Publication

63 Zainul Bahri. "Pengaruh Dinamis Modal Manusia yang Menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", Inovasi, 2024

Publication
